

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

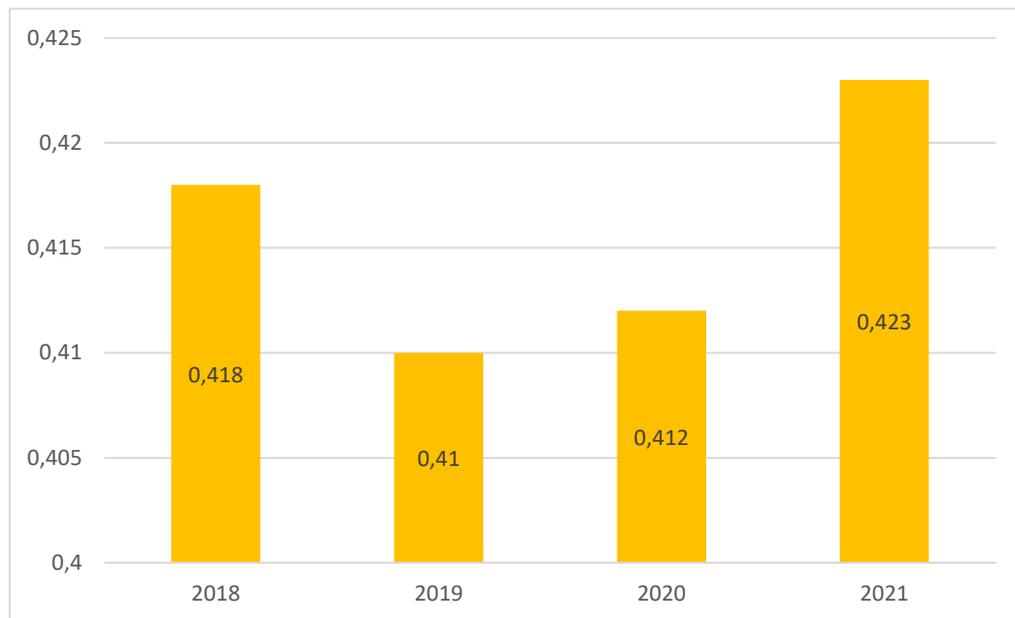
Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dengan itu kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabil dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan pemerataan agar tidak menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perbedaan pembangunan antar daerah, kualitas sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, letak geografis dan suku bangsa juga dapat menentukan ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan. Beberapa faktor tersebut dapat menjadi suatu keuntungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan (Hariani, 2019).

Ketimpangan yang tinggi antar daerah dapat berdampak negatif pada kestabilan ekonomi dan kestabilan politik di suatu negara. Oleh karena itu perlu dibuat berbagai kebijakan supaya perbedaan antar daerah tidak terlalu terlihat, namun sangat sulit untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dalam proses pembangunan ekonomi, terutama dengan adanya *trade-of* antara ketimpangan pendapatan dan pembangunan ekonomi, karena jika pembangunan ekonomi lebih ditunjukkan pada pemerataan pendapatan, maka diperlukan waktu yang relatif lama agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sebaliknya, ketika pembangunan lebih difokuskan untuk mencapai pertumbuhan

yang tinggi, peluang terjadinya ketimpangan pendapatan semakin besar (Kuncoro, 2006) dalam (Hartini, 2015).

Ketimpangan distribusi pendapatan selalu menjadi masalah ekonomi yang paling mendasar karena sulit dipecahkan di hampir semua negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara dimana tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya itu cukup tinggi yaitu kebanyakan masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia disebabkan oleh kurangnya pendapatan. Begitupun tidak jauh bedanya dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, perbedaanya dilihat dari seberapa besar atau kecil tingkat ketimpangan dan tingkat kesulitan untuk mengatasi permasalahannya.

Permasalahan yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang ada di setiap negara dan menjadi masalah yang berkelanjutan, sehingga menjadi masalah yang perlu segera diatasi. Kesenjangan pendapatan antar wilayah dapat dilihat dari indeks gini yang tidak merata sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Bandyopadhyay (2017) mengungkapkan bahwa indeks gini secara luas telah digunakan sebagai ukuran ketimpangan untuk mengukur tren ketimpangan pendapatan. Banerjee (2010) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa indeks gini merupakan yang paling banyak digunakan dalam mengukur ketimpangan pendapatan dan dapat diperluas ke konteks multidimensi dari pengukuran kesejahteraan dan ketimpangan distribusi kesejahteraan di antara individu dalam sebuah masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.



Gambar 1.1 Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

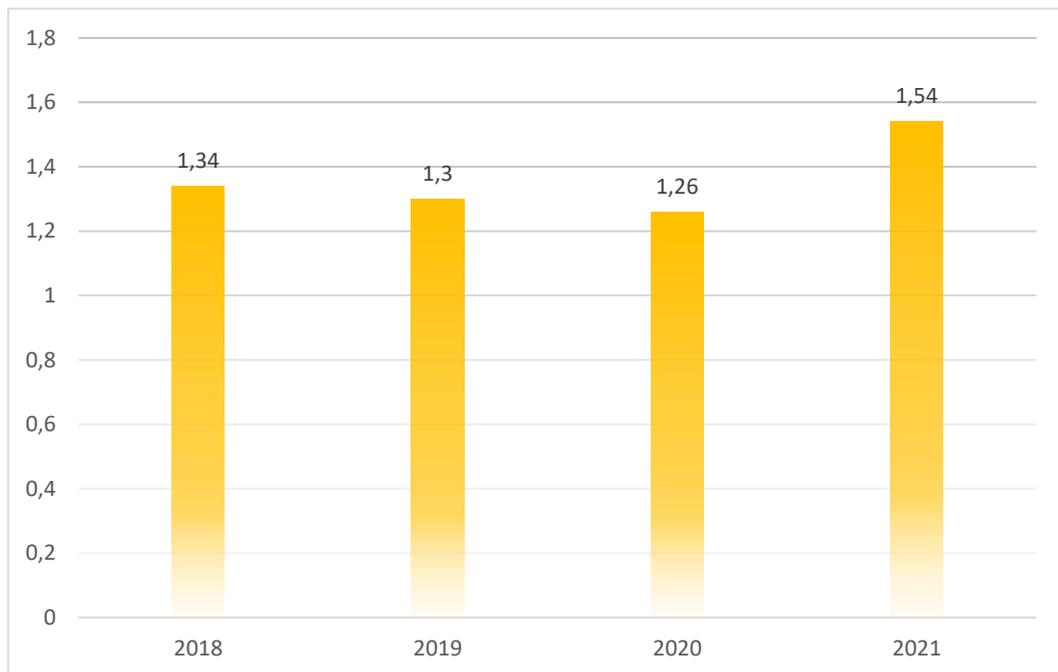
Gambar 1.1, berisi data ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Jawa Barat, nilai ketimpangan pendapatan di Jawa Barat dalam nilai indeks gini dari tahun 2018-2021 mengalami fluktuatif dan mengindikasikan bahwa masalah ketimpangan distribusi pendapatan masih belum merata, indeks gini di Provinsi Jawa Barat berada pada kategori ketimpangan rendah dan sedang, meskipun tidak menyentuh angka 0,5 namun angka indeks gini cenderung menunjukkan peningkatan mencapai 0,42.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, ada banyak faktor yang berkontribusi pada peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan, salah satunya dengan pertumbuhan penduduk. Menurut Lincoln (2010) dalam Anggina (2017) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk biasanya memicu timbulnya masalah lain seperti struktur umur muda, jumlah

pengangguran yang semakin lama semakin tinggi, urbanisasi dan lain sebagainya. Lincoln juga menambahkan bahwa masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah, maupun antar daerah pedesaan dan daerah perkotaan, serta antar sektor.

Musfidar (2012) dalam penelitiannya mengatakan bahwa jumlah penduduk yang berumur produktif baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, akan meningkatkan angka ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan proporsi jumlah penduduk yang bekerja masih belum merata di sejumlah daerah, mereka masih banyak yang bekerja di pedesaan dibandingkan di perkotaan, sehingga terjadi perbedaan penghasilan antar mereka yang bekerja di kota dan mereka yang bekerja di desa, mereka yang bekerja di perkotaan memiliki tingkat penghasilan yang tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang bekerja di pedesaan.

Menurut Todaro dalam Anggina (2017), kesenjangan distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang, dan investasi. Berikut lampiran data laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2021.

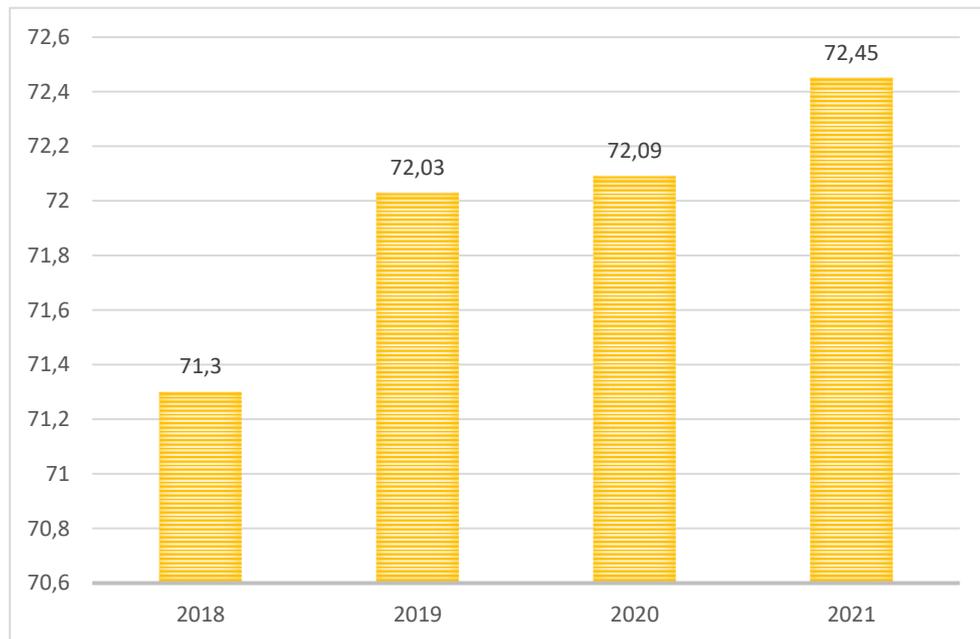


Gambar 1.2 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1.2, menunjukkan data pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2021 yang mengalami fluktuatif, pada tahun 2018 yang semula sebesar 1,34 persen selanjutnya 2019 dan 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 1,30 persen dan 1,26 persen, dan meningkat lagi di tahun 2021 mencapai 1,54 persen.

Selanjutnya, untuk melihat keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusianya, rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, dengan rendahnya IPM maka tingkat produktivitas yang rendah akan berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan. Begitupun sebaliknya, dengan tingginya IPM maka produktivitas penduduk akan semakin tinggi yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi.



Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021 (Persen)

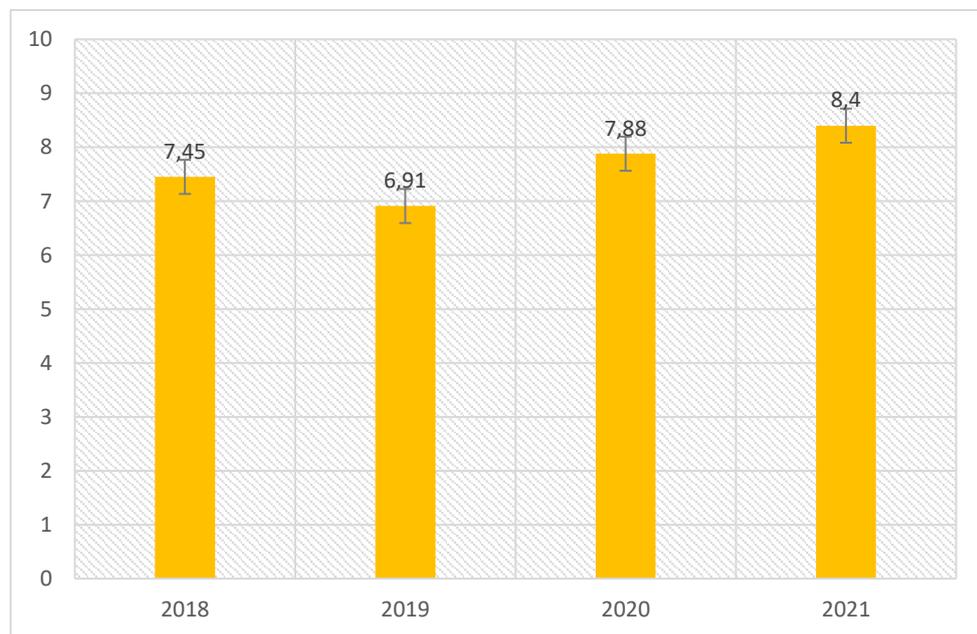
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut Todaro (2006:118) dalam Hariani (2019), komponen penting dari pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan teknologi/cara-cara baru dalam menyesuaikan pekerjaan. Peningkatan kesehatan dan pendidikan dapat dilihat pada indeks pembangunan manusia (IPM). Kesejahteraan manusia terwujud ketika pertumbuhan ekonomi meningkat sejalan dengan penciptaan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja yang dibayar dengan upah yang layak. Rendahnya nilai indeks pembangunan manusia akan mempengaruhi pada produktivitas penduduk dan pendapatan. Permasalahan indeks pembangunan manusia di setiap daerah/wilayah tentu berbeda-beda salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah tidak meratanya distribusi pendapatan antar daerah.

Gambar 1.3, kinerja indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2021 menunjukkan tren yang meningkat. Indeks pembangunan manusia

Provinsi Jawa Barat bukan tergolong yang paling tinggi ataupun yang paling rendah dari provinsi di Indonesia, Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya tergolong pada indeks pembangunan tinggi yaitu lebih dari 70%.

Disamping karena pertumbuhan penduduk dan indeks pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan juga dapat disebabkan oleh kemiskinan, seperti yang telah diungkapkan Arsyad (2017) dalam Hindun et al (2019) mengungkapkan bahwa masalah pemerataan pendapatan juga berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan agar ketimpangan pendapatan yang terjadi semakin rendah. Berikut terlihat data persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2021.



**Gambar 1.4 Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2021 (Persen)**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Ketimpangan tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan ekonomi khususnya kemiskinan. Menurut Todaro (2006) dalam Fanshuri et al (2022) menyimpulkan bahwa ada dua faktor yang menentukan tingkat kemiskinan di suatu negara, yaitu tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat rata-rata pendapatan nasional. Pengurangan ketimpangan distribusi secara langsung mengurangi kemiskinan dan kemudian mempengaruhi kemampuan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan.

Gambar 1.4, persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat yang mengalami fluktuatif setiap tahunnya, di tahun 2019 persentase penduduk miskin Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 6,91%, dan kembali meningkat pada tahun berikutnya sampai mencapai 8,4% dikarenakan penyebab dari adanya pandemi covid-19.

Berdasarkan urain di atas, maka ada beberapa alasan yang mendasari penelitian ini. Pertama, masalah ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dan pada tahun 2021 terlihat dari rasio gininya mencapai 0,423 yang tergolong ketimpangan rendah dan sedang. Kedua, pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan yang mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Ketiga, ingin membuktikan teori dengan realita mengenai ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Maka dari permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah dijelaskan maka dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi permasalahan yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan secara parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan secara bersama-sama terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan secara parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021.
2. Pengaruh pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan secara bersama-sama terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Sebagai sarana penambah wawasan dan pemahaman lebih mendalam khususnya tentang pengaruh pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, dan kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021, tidak hanya teori yang didapat namun juga praktiknya langsung dilapangan.

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan informasi dan referensi bagi pemerintah terutama dinas terkait, dan bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal perumusan ataupun pembuatan kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat membuat kesejahteraan masyarakat meningkat.

3. Bagi Lembaga/Fakultas Ekonomi

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber untuk perkuliahan khususnya di Jurusan Ekonomi Pembangunan sehingga dapat digunakan oleh teman-teman mahasiswa sebagai bahan perbandingan apabila melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama atau serupa.

4. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan kegunaan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan perbandingan dan juga petunjuk pada masalah yang serupa ataupun sebagai masukan bagi pihak lain yang membutuhkan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dengan pengambilan data dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS), karena *website* tersebut menyajikan data-data yang valid untuk menunjang usulan penelitian ini.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian dimulai sejak bulan November 2022 hingga April 2023, seperti pada tabel berikut:

